

Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY

Adi Soeprapto, Susilasti DN dan Basuki Agus Suparno
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: adi_soeprapto@yahoo.com; susilastuti_dn@yahoo.com; basuki.agus@gmail.com

Abstract

General election was frequently perceived as political instrument to verify whether political system is democratic or not. As the instrument for justifying the power, participation of society is very important. Political legitimacy was determined by the political participation. Therefore, swing voter as the first voters has significant position among parties and political candidates in the general election to attract them so they make decision to vote as the parties want. This research was conducted to find out how swing voters conceive and understand the general election and how did they access the information about the general election. By interviews, doing focus group discussion and tracing some of documents, this research was conducted to swing voter as the first voters in Yogyakarta. The results showed us following as: a) knowledge of general election was not enough understanding; b) political affairs does not confine to general election; c) media was important for socializing; d) Television, newspaper and online media were dominant media that were used by swing voter to choose the parties or political candidates.

Keywords: *Swing voters, general election, political system, political communication and information.*

Abstrak

Pemilihan umum sering dipersepsikan sebagai sebuah instrumen politik untuk menguji dan menentukan apakah system politik bersifat demokratis atau tidak. Sebagai instrument untuk menjustifikasi kekuasaan, partisipasi politik masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, swing voter sebagai pemilih pemula memiliki posisi signifikan di antara partai politik dan calon politik dalam pemilu untuk menarik mereka sehingga mereka mengambil keputusan untuk memberikan suaranya pada partai politik yang mereka mau. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta untuk bagaimana pemilih pemula memahami pemilihan umum dan bagaimana mereka mengakses dan mengambil sumber-sumber informasi politik. Melalui wawancara, FGD dan pelacakan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan perilaku pemilih pemula. Hasilnya menunjukkan bahwa persoalan politik menurut pemilih pemula tidak dibatasi hanya masalah pemilu; b) mereka tidak cukup memahami tentang politik secara baik; c) media menjadi sarana penting bagi sosialisasi; dan d) televisi, surat kabar dan media online merupakan media utama yang digunakan pemilih pemula dalam mendapatkan informasi dan bentuk komunikasi politik.

Kata kunci: Pemilih pemula, pemilu, system politik, informasi dan komunikasi politik

Pendahuluan

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan politik telah terjadi apatisme di kalangan pemilih pemula. Fenomena apatisme politik, yang dikenal dengan Golongan Putih (Golput) cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Hal ini dapat melumpuhkan demokrasi. Untuk mengantisipasi dan memberisolusi atas penurunan partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilih maka perlu ditingkatkan program-program komunikasi sebagai bagian dari pendidikan politik yang menekankan pada dimensi kognitif dan perilaku. Karena itu, komunikasi memegang peran penting dalam setiap program-program pendidikan politik.

Meningkatnya angka golput dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah kualitas pendidikan politik kepada pemilih pemula. Sejarah perjalanan rezim Orde Baru selama 32 tahun yang menempatkan politik sebagai sesuatu yang tabu dibicarakan, menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat tentang politik rendah, termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang pergantian pemimpin secara konstitusional dan legitimate.

Di era Reformasi jumlah pemilih golput dalam setiap kali pelaksanaan pemilu angkanya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data KPU tahun 2009 disebutkan bahwa suara sah yang terhitung hanya mencapai 104.099.785 suara dari 171 juta hak suara. Dari 171 juta penduduk tersebut, sekitar 10% yakni 17.488.581 penduduk menggunakan hak suara secara keliru/salah sehingga menyebabkan suara tidak sah mencapai 66,9 juta dengan jumlah 67 juta hak suara golput. (KPU.go.id.akses tanggal 5 Mei 2010).

Tingginya angka golput mengindikasikan pelaksanaan demokrasi politik berjalan tidak sesuai yang diharapkan. Indikasinya terlihat dari rendahnya legitimasi hak berkuasa atas warganegara dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada sistem politik yang berlaku. Kualitas demokrasi menjadi berkurang dan hal

ini tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu golput sedapat mungkin diminimalkan.

Salah satu kelompok pemilih yang patut dipertimbangkan adalah pemilih pemula. Pemilih pemula, adalah mereka yang berada pada kisaran usia 17-20 tahun atau mereka yang untuk pertama kalinya mengikuti pemilu. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 20% pada saat Pemilu 2009 silam (Rubyanti, 2009). Jumlah ini sangat signifikan, mengingat potensi yang dimilikinya, sebagaimana dilansir oleh Qodri dalam Rubyanti (2009) bahwa mereka : 1) akan membuat partai baru bisa lolos *parlementary threshold*, 2) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden; 3) berpeluang menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia. Karena posisi tersebut, mereka menjadi sasaran bidik partai politik. Pemilih pemula merupakan pemberi suara yang masih menggambang atau *swing-voter*, dimana sekitar 33,9% masih belum menentukan partai politik mana yang akan dipilih dan hanya 1,5% saja mengetahui keberadaan partai baru.

Pendidikan politik pada dasarnya adalah melakukan rekonstruksi atas nilai-nilai yang selama ini ada dan membangun nilai-nilai baru. Lazimnya pendidikan, ini menyediakan proses transformasi pengetahuan, pembentukan sikap-sikap tertentu dan perubahan-perubahan perilaku yang dituju. Aspek pertama, menyangkut dimensi kognitif, sedangkan aspek kedua dan ketiga merupakan aspek afektif dan behavioristik. Dengan demikian pendidikan politik memiliki makna penting dan strategis, yang menggerakkan warga negara (para pemilih) memiliki pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan pentingnya sistem politik yang ideal serta perilaku politik yang cerdas dan kritis (Nasiwan, 2005).

Adapun Pambudi (2003:7) mengungkapkan tiga alasan mengapa pendidikan politik mempunyai makna strategis yaitu, *pertama*, untuk melakukan rekonstruksi nilai-nilai yang selama ini ada dan membangun nilai-nilai baru. *Kedua*, melalui pendidikan politik

berfungsi membangun orang yang terampil menuntut dan mengawal setiap kebijakan agar kebijakan tersebut benar-benar hadir membawa semangat keadilan dalam masyarakat. *Ketiga*, untuk membangun proses transformasi sosial yang lebih adil dalam masyarakat.

Pendidikan politik juga memberi pemahaman pada warga negara bahwa untuk mengubah realitas politik ke dalam sistem politik yang ideal, ditandai adanya perubahan kebudayaan politik baru. Kondisi ini sering menjebak kalangan masyarakat idealis menjadi apatis dan sebagian lagi *golput* (Nasiwan, 2005). Disinilah letak urgensi pendidikan politik bagi pemilih. Di satu sisi ia dapat berfungsi sebagai sosialisasi politik (pelestarian nilai-nilai politik) lama yang dianggap baik. Di sisi lain, pendidikan politik kepada pemilih pemula dapat berfungsi untuk melakukan pembaharuan politik (reformasi politik), suatu perubahan politik yang *predictable*, dan terencana. Sementara pengembangan pendidikan politik seperti apapun tidak dapat dilepaskan dari persoalan komunikasi sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi dan mengubah keputusan dan perilaku seseorang. Penyampaian, relevansi pesan dan kredibilitas penyampai merupakan persoalan komunikasi dalam pendidikan itu sehingga mempertimbangkan segi dan proses komunikasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah: "Bagaimana peran komunikasi dalam membantu meningkatkan pemahaman pemilih pemula dalam rangka meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2014?"

Bertolak dari filsafat tentang manusia, Paulo Freire (1996:ix) merumuskan hakikat pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali baru. Bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas dan diri sendiri. Pengenalan itu tidak cukup bersifat objektif atau subjektif, tetapi harus kedua-duanya. Kebutuhan objektif untuk

merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subjektif (kesadaran subjektif) untuk mengenali lebih dahulu keadaan-keadaan yang tidak manusiawi, yang senyatanya objektif.

Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektif yang ajek dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan. Ini menjadi bagian yang harus dipahami. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam ini dapat menjebak kita ke dalam kerancuan berpikir. Pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektis yang ajek yakni pendidik, yang dididik dan realitas dunia. Masalah pertama dan kedua adalah subyek yang sadar, sementara masalah yang ketiga adalah obyek yang tersadari atau disadari. Dalam perspektif komunikasi, pendidik dapat didudukkan sebagai penyampai (komunikator), peserta didik (audience) dan realitas dunia adalah konteks di mana pesan berada dalam bingkai kepentingan dan tujuan yang ingin dituju.

Hubungan dialektif semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan yang mapan selama ini. Sistem pendidikan yang pernah ada dan mapan selama ini dapat diandaikan sebagai sebuah bank (*banking concept of education*) di mana peserta didik diberi pengetahuan agar kelak mendatangkan hasil berlipat ganda. Di sini, peserta didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditas ekonomi. Anak didik pun diperlakukan sebagai bejana kosong yang akan diisi sebagai penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak.

Lebih jauh, Freire menyusun daftar antagonis yang dapat dilihat dalam relasi antara pendidik (komunikator) dan yang dididik (audience). Sejumlah antagonism ini terlihat seperti: a) guru mengajar/menyampaikan, murid belajar/menerima; b) guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; c) guru berpikir, murid dipikirkan; d) guru bicara, murid mendengarkan; e) guru memilih dan memaksakan pilihan, murid menuruti; f) guru subyek proses belajar, murid

obyeknya dan seterusnya.

Dalam situasi semacam itu, pendidik menjadi pusat segalanya, maka merupakan yang lumrah jika peserta didik kemudian mengidentifikasi diri seperti gurunya sebagai prototype manusia ideal yang harus ditiru. Dengan pendidikan semacam itu, justru menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan status quo sepanjang masa. Pendidikan semacam itu tidak menjadi kekuatan penyangga, kekuatan penggugah ke arah perubahan dan pembaharuan. Menurut Freire, pola atau model pendidikan itu paling jauh hanya akan mampu mengubah penafsiran /interpretasi seseorang terhadap situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu mengubah realitas dirinya sendiri.

Ia akan menjadi penonton dan peniru, bukan pencipta sehingga mudah dipahami mengapa. Bagi Freire pendidikan adalah proses komunikasi untuk pembebasan. Pendidikan harus menjadi proses pembebasan, bukan penjinakan sosial budaya. Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi. Dengan pendidikan ini, semestinya merangsang ke arah diambilnya suatu tindakan, kemudian tindakan direfleksikan kembali dan dari refleksi diambil tindakan baru yang lebih baik.

Dengan daur semacam itu, peserta didik secara langsung dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan realitas dunia dan keberadaan diri mereka sendiri. Secara tegas Freire menyebut model pendidikan yang ditawarkan sebagai model pendidikan hadap masalah (*problem posing education*). Pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek yang belajar, subyek yang bertindak dan berpikir dan pada saat bersamaan menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya. Begitu juga pendidikannya.

Dalam model ini, yang menjadi obyek pendidikan adalah realitas. Dalam bayangan Freire, model pendidikan yang diusulkannya ini merupakan proses komunikasi yang bersifat inter subyek yang dialogis. Dengan kata lain, langkah awal dalam upaya melakukan

pendidikan penyadaran adalah suatu proses yang terus menerus yang selalu mulai dan mulai lagi. Karenanya, proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang inheren dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri yang dipahami sebagai proses komunikasi yang mencerdaskan.

Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti dan mandeg, ia senantiasa harus terus berproses, berkembang dan meluas dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat kesadaran naif sampai ke tingkat kesadaran kritis sampai akhirnya mencapai kesadaran tertinggi dan terdalam. Penjelasannya adalah jika seseorang telah mampu mencapai tingkat kesadaran kritis terhadap realitas, orang itu pun mulai masuk dalam proses pengertian dan bukan proses menghafal semata-mata.

Orang yang mengerti adalah bukanlah orang yang menghafal, karena ia menyatakan diri atau sesuatu berdasarkan suatu sistem kesadaran tertentu termasuk kesadaran dalam mengambil keputusan terhadap pemilihan dan perubahan politik. Sedangkan orang yang menghafal hanya menyatakan diri atau sesuatu secara mekanistik, tanpa perlu menyadari dari mana ia telah terima hafalannya dan untuk apa ia menyatakannya kembali.

Dalam proses komunikasi, kata-kata menjadi mempunyai arti yang sangat penting. Kata-kata yang dinyatakan seseorang sekaligus menunjukkan dunia kesadaran, yang menjelaskan fungsi interaksi antara tindakan dan pikiran. Dalam dimensi psikologis, perilaku yang manifest (*behavioral*), setidaknya dapat dijelaskan dari pemahaman (*cognitive*) terhadap pengetahuan dan pengalaman yang diterimanya. Proses ini pada gilirannya akan membentuk kerangka pikir dan rujukan yang memandu kesadaran bertindak dan berperilaku.

Pendidikan yang tercermin dalam proses komunikasi harus memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk mengatakan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata orang lain. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk

mengatakan dengan kata-katanya sendiri. Proses pelaksanaan dan keterbacaan pada tingkat yang paling awal sekali dari semua proses pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses fungsional komunikatif dari individu, bukan sekedar suatu kegiatan teknis.

Proses fungsional komunikatif individu mencakup tahap kodifikasi dan dekodifikasi di mana pendidikan harus mencakup melek dalam konteks konkret dan konteks teoritis; tahap diskusi kultural yang merupakan tahap lanjutan dalam satuan kelompok kerja kecil yang sifatnya problematik dengan menggunakan kata-kata kunci; tahap aksi kultural merupakan tahap praksis yang sesungguhnya di mana tindakan setiap orang atau kelompok menjadi bagian langsung dari realitas.

Jadi, pendidikan politik sebagai proses komunikasi politik misalnya harus merupakan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan kekuasaan secara mendasar, karena pendidikan menjadi ajang terjalannya makna, hasrat, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam tentang apa sesungguhnya yang disebut manusia dan apa yang menjadi impiannya. Ketiga, pendidikan merupakan tempat untuk merumuskan dan memperjuangkan masa depan.

Keterjalinan ini akan semakin kuat dan utuh ketika pola-pola pendidikan dikuatkan oleh perilaku belajar. Pendidikan mensyaratkan adanya perilaku belajar yang aktif. Belajar adalah sebuah bentuk penemuan kembali, penciptaan kembali dan penulisan kembali. Perilaku belajar berarti memikirkan pengalaman. Sedangkan memikirkan pengalaman adalah cara terbaik untuk berpikir secara benar.

Secara konseptual, pembicaraan tentang politik, pada umumnya mengacu pada masalah-masalah kekuasaan; bagaimana sumber-sumber kekuasaan dialokasikan; praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan; pengambilan keputusan bagi kepentingan umum; dan kebijakan umum (Andrain, 1992:17). Dalam domain yang sangat luas itu, seringkali terjadi kesenjangan-kesenjangan tertentu terhadap

apa yang menjadi fakta dan kenyataan politik; dengan tataran normatif dalam ajaran-ajaran politik yang *par excellence*. Tetapi realitas yang secara terus menerus terjadi tersebut menjadi bahan pengetahuan dan pengalaman di dalam memahami politik. Tidak semua kenyataan menjadi seharusnya. Pembelajaran politik seharusnya diarahkan pada berbagai bentuk kesadaran politik, perilaku politik yang cerdas dan partisipasi politik yang sadar.

Pendidikan politik dirujuk sebagai tempat sandaran penting bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem politik yang sedang terancam. Misalnya proses rekrutmen elit politik yang didasarkan pada basis modal ekonomi dan tidak berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tertentu; politik yang tidak berdasarkan pada pemihakan kepada rakyat, tercerabutnya basis etika politik. Pendidikan politik diharapkan mengoreksi dan membangun kesadaran terhadap ancaman yang tengah berlangsung atas proses distorsif dalam sistem politik yang sedang berjalan.

Perilaku politik masyarakat setidaknya dapat dirunut dari level-level psikologis yang terjadi dalam proses dan selama berlangsungnya pendidikan. Bagaimana pun proses pendidikan masyarakat itu akan terus berlangsung yang bentuknya tidak hanya dalam bentuk sekolah-sekolah. Sekolah hanyalah merupakan bagian dari pendidikan, tetapi pendidikan semestinya mempunyai dimensi yang lebih luas.

Dalam tataran permukaan, masyarakat mempunyai *stock of knowledge* sebagai kognisi sosial. Formasi kognisi sosial ini terbentuk dalam kontinum waktu tertentu, terekam, tersimpan, dan tersistematisasi dalam struktur kognitif dalam interaksi komunikasi yang kontinum dan lama. Dalam terminologi lain, *stock of knowledge* ini merupakan *tacit knowledge* sebagai pemahaman dan pengetahuan alam bawah sadar yang perlu didorong keluar sehingga menjadi sesuatu yang manifest atau eksplisit.

Dalam proses pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari proses mengetahui, apa yang diketahui, bagaimana mengetahui. Proses

mengetahui terkandung pengetahuan dan pengalaman. Dalam posisi demikian, masyarakat bukan tidak berada dalam posisi sebagai bejana kosong yang tidak tahu apa-apa. Dalam masyarakat selalu tercipta suatu dinamika, cara hidup kebiasaan-kebiasaan, dan menyerap realitas yang ada di sekelilingnya. Setiap bagian masyarakat membangun kultur, tradisi, struktur, dan kebiasaannya sendiri.

Dalam proses mengetahui, setiap elemen masyarakat mempunyai cara-cara tersendiri dalam menerima dan menyerap apa yang mereka perlukan terhadap pengetahuan-pengetahuan politik. Proses ini dapat pasif dan aktif atau kontinum di antara keduanya. Keingintahuan terhadap pengetahuan tertentu, pada umumnya digerakan oleh kebutuhan informasi yang diperlukan di seputar kehidupan mereka. Dengan perkataan lain, proses mengetahui tidak berjalan dalam suatu ruang hampa tanpa kepentingan dan kebutuhan. Semakin kuat kepentingan dan kebutuhan itu, semakin kuat keingintahuan terhadap pengetahuan tertentu. Dengan demikian, proses mengetahui tidak dapat dipandang semata-mata transfer pengetahuan, tanpa memahami level kepentingan dan kebutuhan yang mereka inginkan.

Mereka mendialogkan apa yang mereka perlu ketahui dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dan mereka miliki. Setiap penerimaan pengetahuan, dapat bersifat *reinforcement*-yakni penguatan terhadap pengetahuan yang mereka sudah miliki; memperluas pengetahuan, mengisi kekosongan pengetahuan atau mendistorsinya. Dengan perkataan lain, dalam proses mengetahui, pengetahuan politik, sepanjang digunakan untuk membangun kesadaran, perilaku serta tindakan yang cerdas, mampu meneguhkan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan asumsi terhadap praktek-praktek politik. Dengan demikian phobia dan asumsi yang salah terhadap politik tidak menjadi pemicu terjadinya apatisme politik.

Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan apapun jenisnya, tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut.

Pendidikan politik menurut Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakannegarabertujuan(1)mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), (2) menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara (3) memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai. (Soemarno, AP, 2002).

Safrudin sebagaimana dikutip (Ahdiyana, 2009), menyatakan bahwa pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan terhadap konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Menurut Pangabean (Sihabudin Zuhri, 2010) pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa menstransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian. Berdasarkan pemahaman ini, pendidikan politik tidak hanya sekedar menumbuhkan partisipasi politik (menggunakan hak pilih dalam pemilu-red) tetapi juga bagaimana dilakukan transfer pengetahuan tentang cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sihabuddin Zuhri, 2010).

Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif

(Ahdiyana, 2009). Berdasarkan pemahaman ini jelaslah pendidikan politik merupakan sebuah proses pendidikan (education process) yang tidak bisa dilakukan secara cepat, instan.

Untuk menunjang suksesnya pemilu, diperlukan partisipasi rakyat dalam keseluruhan prosesnya, termasuk dalam hal penggunaan hak politik masing masing. Menurut Mawardi (2008), partisipasi politik rakyat merupakan keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit--hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai *governance*)--dan juga politik secara luas--semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, partisipasi politik rakyat sebenarnya merupakan tema sentral dalam proses demokratisasi, di mana masyarakat dapat berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depan *society*-nya.

Ramlan Subakti (1992) menyebutkan partisipasi politik adalah aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Sementara Mariam Budiharjo (2008) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (public policy). Berdasarkan definisi di atas, jelaslah agar masyarakat memiliki kadar partisipasi yang baik, maka perlu diberikan sebuah pemahaman tentang peran strategis mereka dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perannya dalam pemilihan umum.

Dari aspek partisipasi politik—walapun oleh banyak pihak bukan partisipasi politik murni karena adanya tekanan dari pemerintah yang berkuasa—cukup tinggi. Misalnya, Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977 dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara

serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen (KPU.go.id akses 31 Oktober 2013).

Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 2009 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik. Nurhadiatmono menyatakan bahwa angka partisipasi dalam pemilu 2009 adalah yang terendah dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, di mana untuk pemilihan legislatif pemilih yang menggunakan hak pilihnya 70,96%, sedangkan dalam pilpres 2009, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 72,56%, dan untuk penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang telah berlangsung di beberapa daerah menunjukkan potensi Golput yang berkisar 32% - 41,5% (KPU DIY,2011)

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Fenyapwain (2013) membagi pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yakni (1) pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam; (2) pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi; (3) pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Setiajid (2011) menguraikan karakter pemilih pemula sebagai berikut: (1) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi

sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Setiajid (2011) mengungkapkan bahwa pemilih pemula memiliki kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum, mengingat : (1) alasan kuantitatif yaitu mempunyai jumlah yang secara kuantitatif relatif banyak (2) merupakan segmen pemilih yang mempunyai pola yang sulit untuk diatur atau diprediksi, (3) kekhawatiran lebih condong golput dan (4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula. Kekuatiran krusial dari perilaku politik pemilih pemula adalah soal golput yang secara konseptual sering dikaitkan dengan persoalan partisipasi politik.

Huntington dalam Nasiwan, (2005) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan demikian orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini terkait dengan adanya tiga hak yang melekat pada dirinya, yaitu : hak sebagai warga negara, hak politik dan hak sosial.

Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua (Sastroatmodjo dalam Mardatillah, 2009), yaitu:

- a. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, men-

gajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

- b. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan menaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam partisipasi politik adalah kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan final tentang pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Sebagian besar dari apa yang dinamakan politik, dan sebagian besar pengalokasian sumber-sumber daya di antara golongan-golongan dalam masyarakat dapat berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Dengan demikian maka besarnya partisipasi politik di dalam suatu masyarakat, sampai tingkat tertentu tergantung kepada lingkup kegiatan pemerintah di dalam masyarakat (Huntington dalam Nasiwan, 2005).

Pendidikan politik sebagai proses komunikasi bagi pemilih pemula sangat diperlukan agar mereka mempunyai pengetahuan politik yang memadai, sikap-sikap politik dan perilaku politik yang cerdas. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah: a) untuk mengetahui pemahaman pemilih pemula tentang politik dan relevansinya terhadap pendidikan politik sebagai proses komunikasi yang telah mereka terima dan untuk memahami relasi dan inter-relasi yang terjadi bagi pengembangan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang ada di masyarakat (Mantra, 2004). Menurut Sukardi (2010) penelitian deskriptif hanya berupaya menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya dan tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam penelitian.

Penelitian tentang pendidikan politik sebagai proses komunikasi merupakan penelitian yang berupaya untuk menggali informasi secara mendalam untuk mendeskripsikan pemahaman atas pengetahuan politik pemilih pemula tentang politik, mengidentifikasi bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan politik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer, yang diambil dari :

- a. Kuesioner yang disebar kepada responden
- b. Observasi terhadap obyek penelitian

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah:

- a. Peraturan yang terkait dengan Pemilihan Umum.
- b. Dokumen dan publikasi yang terkait mengenai pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Kertas kerja/TOR/Proposal/laporan kegiatan pendidikan pemilih/sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU maupun pihak lain.

Interviews guide, yang disusun untuk mengungkapkan tanggapan dan pendapat pemilih pemula mengenai sistem pemilihan umum, alasan berpartisipasi dlm pemilu, sumber informasi pemilu yang mereka peroleh

- a. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara aktif kepada narasumber

dengan menggunakan panduan wawancara untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan melalui observasi.

- b. *Focus Group Discussion* (FGD), digunakan untuk memperoleh informasi secara terarah dan interaktif akan topik penelitian dengan melibatkan kelompok sasaran dan pihak-pihak yang terkait.
- c. Dokumentasi, dengan menggali informasi dari pelbagai dokumen tertulis terkait dengan pemilihan umum

Hasil dan Pembahasan

Makna Pemilu Bagi Pemilih Pemula

Pemilihan umum sebagai sebuah proses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki makna strategis bagi warga negara. Pemaknaan pemilihan umum bagi pemilih pemula mencerminkan pemahaman dan pengertian yang luas. Satu individu dengan individu yang lain memiliki penilaian dan pemahaman yang sepenuhnya tidak sama. Diantaranya ada yang optimis bahwa pemilu bagaimanapun kualitas penyelenggaraannya sejelek apa pun tetap memiliki kedudukan dan peran yang penting bagi system politik. Pemilu juga sering dijadikan tolak ukur apakah sebuah system politik dikatakan demokratis ataukah otoriter. Seberapa besar masyarakat memberi kepercayaannya atas mekanisme politik pemilu ini. Secara keseluruhan makna pemilu dihadapan pemilih pemula mencakup hal-hal berikut:

a. Proses terbaik penentuan pemimpin politik

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses terbaik untuk menentukan pemimpin politik sesuai dengan kehendak pemilih. Tidak ada pemilih pemula yang tidak sependapat kalau pemilihan umum merupakan mekanisme terbaik dalam penentuan pemimpin politik. Sejelek apa pun penyelenggaraannya, tetap dimaksudkan untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk lima tahun ke depan. Lima tahun ke depan itulah akan diuji apakah apa yang dinilai masyarakat

secara umum terbukti di dalam perjalanan kepemimpinan tersebut.

b. Mekanisme Pergantian Kekuasaan secara berkala

Pemilu merupakan mekanisme yang memungkinkan adanya pergantian kekuasaan secara berkala. Sejalan dengan pandangan di atas, jika ternyata kualitas pemimpin yang dipilih dalam mekanisme pemilu terbukti di dalam perjalanan kepemimpinannya, bukannya tidak mungkin ia akan dipilih kembali. Tetapi berdasarkan wawancara mendalam dan melalui pengembangan Focus Group Discussion, pemilih pemula menyakini bahwa pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala. Pergantian kekuasaan secara berkala ini sekaligus dimaksudkan sebagai pergantian kekuasaan yang konstitusional.

c. Perwujudan partisipasi warganegara

Pemilu merupakan merupakan perwujudan partisipasi warganegara untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan kehendaknya. Dalam iklim komunikasi politik yang sangat terbuka seperti sekarang ini, para pemilih pemula menilai bahwa apa yang menjadi kehendak rakyat sebagai perwujudan bentuk partisipasi politik mencakup dua hal penting, yakni berpartisipasi memilih dan berpartisipasi untuk tidak memilih. Bagi pemilih pemula pilihan tersebut memiliki alasan dan argumennya masing-masing. Proses komunikasi politik dan iklim komunikasi politik yang terbuka membuka kesadaran dan sikap politik itu sendiri, apakah terlibat aktif atau sekedar menjadi penonton yang menilai kehidupan politik sebagai drama tontonan.

d. Mekanisme pendidikan politik

Pemilu sebagai kegiatan politik dapat menumbuhkan banyak hal bagi warganegara termasuk pengetahuan-pengetahuan baru terhadap perkembangan politik yang terjadi. Realitas politik ini memberi semacam pendidikan politik bagi warganegara. Pemilu merupakan mekanisme pendidikan politik bagi warganegara terlebih bagi pemilih pemula. Di samping kesadaran ini pemilih pemula juga menyadari

adanya proses pembodohan politik yang dilakukan eliti politik. Namun demikian justru mendudukan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang semata-mata dipandang buta politik dan tidak tahu apa-apa menjadi cara lain bagi masyarakat dalam memahami realitas politik yang ada.

e. Pemilu identik dengan *money politic* (politik uang)

Bagian ini merupakan makna negatif dari praktek-praktek politik secara praksis. Pemilu lebih dimaknai sebagai transaksional yang tidak mencerdaskan. Pemilu diidentikkan dengan politik uang. Dalam pandangan pemilih pemula, banyak situasi tertentu yang dikondisikan secara instans yang mengesankan sebagai sesuatu yang baik. Pemilih pemula menilai bahwa politik yang bersifat tgransaksional dipicu oleh adanya asumsi dan budaya politik yang memang dikembangkan oleh elit politik yang ada dalam partai politik. Politik adalah transaksional. Politik wani piro.

f. Pemilu hanya untuk kepentingan sesaat/jangka pendek

Dari sisi kepentingan tertentu, pemilihan umum dapat dimaknai dalam dua kepentingan sekaligus yakni kepentingan jangka panjang dan kepentingan jangka pendek. Dalam jangka pendek, pemilihan umum dapat dimaknai sebagai upaya untuk melakukan sirkulasi dan rotasi kekuasaan. Dalam jangka panjang, pemilu dipakai untuk memastika kesinambungan system politik.

Lingkup Pengetahuan tentang Pemilu Bagi Pemilih Pemula

Pemilihan umum sebagai sebuah proses yang diatur melalui mekanisme tertentu dari awal hingga akhir yang melibatkan pemilih, peserta dan penyelenggara dengan persyaratan tertentu pula. Sebagai sebuah system politik, di dalamnya terdapat unsure-unsur yang saling terlibat. Di dalam system tersebut, terdapat sub system yang menopang keseluruhan system. Di dalam sub sistem sendiri terdapat bagian-bagian yang lebih terperinci lagi. Pengetahuan pemilih pemula akan sistem pemilihan umum menjadi sangat penting. Apa saja yang mereka pahami

dan ketahu. Identifikasi terhadap pemahaman terhadap pemilu kemudian menjadi penjas yang sangat penting dari sumber-sumber informasi dan komunikasi pemahaman dan pengetahuan itu mereka dapatkan.

Secara garis besar pengetahuan pemilih pemula terhadap pemilu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Para pemilih pemula mengetahui persyaratan secara global (garis besar) menjadi seorang pemilih. Faktor usia, sebagai warganegara, tidak sedang menjalani hukuman atas putusan pengadilan, dan status perkawinan merupakan persoalan-persoalan pokok yang mereka ketahui sebagai persyaratan umum.
- b. Kebanyakan pemilih pemula sebagai narasumber penelitian ini tidak mengetahui secara persis jumlah partai politik sebagai peserta pemilu. Mereka mengenal sejumlah partai politik yang selama ini sering disebut-sebut dan dipertimbangkan sebagai partai politik yang mapan dan cukup lama.
- c. Kebanyakan pemilih pemula tidak mengetahui secara persis apa yang telah dilakukan KPU dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu 2014. Bahkan ada diantaranya tidak mengenal KPU sebagai lembaga Negara yang mengurus penyelenggaraan pemilu. Apalagi hubungan yang terjadi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah. Bagaimana lembaga ini bekerja dan menjalankan persiapannya, banyak dari narasumber yang diteliti dalam penelitian tidak mengetahuinya. Ketidaktahuan ini juga mencakup pengetahuan mereka tentang system pemilu yang diterapkan. Bagaimana tahap-tahap pemilu disosialisasikan kepada masyarakat dan bentuk partisipasi politik seperti apa yang diharapkan, tidak sampai kepada

mereka secara memadai.

Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara terus-menerus dalam sebuah masyarakat sehingga mampu memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal sehingga mampu membentuk kepribadian, kesadaran dan partisipasi politik secara positif. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pendidikan politik dapat dipandang sebagai proses komunikasi-yakni penyampaian pesan politik terhadap masyarakat/konstituen/massa yang digunakan untuk menambah pengetahuan atau merubah sikap-sikap politik tertentu.

Sebagai pendidikan politik yang merupakan bentuk komunikasi politik, dapat terjadi di mana saja, seperti di partai politik, di lingkup kampung, sekolah dan perguruan tinggi. Para pemilih pemula terbuka dalam menerima pendidikan politik sebagai bentuk dan proses komunikasi politik. Dalam posisinya sebagai pelajar atau mahasiswa serta sebagai pemuda, mereka mendapatkan pendidikan politik di sekolah, perguruan tinggi dan organisasi sosial serta kesiswaan dan kemahasiswaan. Apa saja yang tergal dari proses ini dari para pemilih pemula ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman akan dinamika situasi politik saat ini

Para pemilih pemula sebagai subyek penelitian ini meragukan jika pendidikan politik yang ada mampu membuat mereka paham dan memahami dinamika situasi politik yang berkembang. Apa yang mereka terima dari mata kuliah atau mata pelajaran yang terkait dengan persoalan-persoalan politik tidak menukik pada persoalan actual politik yang berkembang. Dengan demikian, apa yang diterima secara normative dalam proses-proses pendidikan yang diterima itu sebenarnya jauh dari relevansi situasi politik yang ada khususnya tentang pemilihan umum, partai politik, elit politik sebagai aktor politik dan fenomena politik sebagai transaksional.

b. Peningkatan pengetahuan akan hak-hak dan sistem politik

Pendidikan politik yang berhasil dan bermanfaat seharusnya mampu memberi peningkatan pengetahuan tentang kesadaran akan hak-hak politik dan hak-hak warganegara di dalam system politik secara keseluruhan. Bagi pemilih pemula misalnya, jika kesadaran hak-hak politik ini ada pada mereka, dirasakan menurut mereka tidak berasal dari proses pendidikan politik yang ada dan dilakukan oleh lembaga-lembaga politik dan pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan partai politik. Lembaga-lembaga Negara lainnya seperti KPU, Departement Komunikasi dan Informatika, atau lainnya tidak melakukannya dalam rangka memberi peningkatan kesadaran politik melainkan sekedar formalitas dan tujuan normatif mereka.

c. Sikap kritis dan Ketrampilan Politik

Sikap kritis dan ketrampilan politik ialah bagian penting dari tujuan adanya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Seberapa bermakna pendidikan politik yang ada, yang dirasakan pemilih pemula, terhadap pendidikan politik yang mereka terima, memberi kemampuan bersikap kritis dan memberi ketrampilan politik.

Kemampuan kritis terhadap politik diperlukan manakala kekuasaan disalahgunakan (abuse of power) sehingga mereka tergerak untuk melakukan dukungan dan tuntutan yang tepat dan bermanfaat. Sedangkan ketrampilan politik memiliki pengertian yang luas seperti negosiasi, lobbying, demonstrasi, berorasi, dan berkampanye. Mereka juga memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam berargumentasi berdasarkan pada kaidah aturan dan konstitusi yang berlaku.

Kenyataannya, para pemilih pemula dalam subyek penelitian ini pun meragukan dan merasa tidak mendapatkan kemampuan sikap kritis dan ketrampilan politik melalui pendidikan-pendidikan normative dan formal. Sejauh yang mereka rasakan apa yang disebut sebagai kemampuan sikap kritis terhadap politik semestinya dibingkai untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemilu sendiri sebagai puncak-puncaknya pendidikan politik

rakyat justru menjadi momentum bagi terjadinya *politics transactional*.

Sumber Informasi Politik

Adanya informasi yang memadai berdampak pada terbangkitnya pengetahuan yang pada gilirannya akan mendorong pada munculnya tindakan. Dalam hal ini, identifikasi atas sumber informasi politik memberi gambaran mengenai bagaimana pemilih pemula mendapatkan dan menggunakan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan politik. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sedemikian revolutif, akses terhadap media pendidikan politik sangat mudah dilakukan oleh pemilih pemula. Sangat jarang terjadi, individu-individu dalam masyarakat apalagi generasi mudah (baca: pemilih pemula) hanya bergantung pada satu sumber media informasi politik. Berbagai media yang ada, apakah media baru atau pun media lama, saling bersaing dan dimanfaatkan bagi kegiatan penyaluran informasi dan kegiatan politik. Media itu sendiri merupakan cerminan dari kekuatan politik.

a. Sumber pemerolehan informasi politik

Para pemilih pemula menggunakan media sebagai sumber pemerolehan informasi politik. Sebagian besar masih menyatakan bahwa televisi, tetap merupakan sumber informasi politik yang utama. Kedua, adalah media online yang berkembang utamanya dalam media sosial. Banyak informasi politik berseliweran dalam media sosial seperti facebook atau twitter. Ketiga, pemilih pemula melihat spanduk atau baliho jelang pemilu 2014 sebagai sumber informasi politiknya dibandingkan dengan radio atau selebaran. Meskipun dalam intensitas yang menurut mereka rendah dan jarang, kadangkala mereka dalam aktivitas sosial mereka, mendapatkan informasi politik melalui penyuluhan.

b. Sumber informasi politik yang paling mudah dipahami

Sebagai media politik, televise, media online, radio, surat kabar, selebaran dan spanduk,

penyuluhan dan bentuk sosialisasi lainnya, sebenarnya memiliki derajat akseptabilitas tersendiri bagi pemilih pemula. Dalam arti akseptabilitas tersebut dimaknai sebagai media yang paling diminati, paling sering diakses, dan kemudian dipercaya paling mudah dipahami sebagai sumber informasi politik. Meskipun disebut-sebut, sumber informasi politik dari keluarga, tidak dipandang sebagai sesuatu yang mudah dipahami. Ini terkait dengan intensitas dan interaksi dalam keluarga itu sendiri. Sebab sangat mungkin, tipe keluarga satu dengan keluarga yang lain dalam hal membicarakan dan mendiskusikan informasi politik, bukan sebagai sesuatu yang penting dan relevan. Keluarga bukan sumber informasi politik yang mudah dipahami. Oleh karena itu, pemilih pemula ini menilai bahwa televisi tetap sebagai media informasi yang paling mudah dipahami dalam memberikan informasi politik. Selain itu spanduk, surat kabar dan media online menjadi sumber media lain yang dinilai dalam memberikan informasi mudah dipahami.

c. Sumber informasi politik termudah diakses

Dari pilihan sumber informasi politik yang tersedia, ada empat pokok media yang mudah diakses oleh pemilih pemula dalam pemilihan umum. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam penilaian pemilih pemula, televisi, surat kabar, media online dan spanduk merupakan media yang paling mudah diakses dalam arti mudah didapatkan dan tersedia di mana-mana. Bahkan di luar kesadaran para pemilih pemula, media-media tersebut seakan selalu hadir di luar kesadaran dan kemauan serta keinginan para pemilih pemula.

d. Sumber informasi politik terlengkap

Dalam penilaian pemilih pemula, setiap media memberikan informasi politik masing-masing sesuai dengan garis ideology dan kepentingan masing-masing media pula. Kelengkapan sebuah informasi politik yang disampaikan media tidak dapat dilepaskan dari karakteristik medianya. Bagi pemilih

pemula, media online, televisi dan surat kabar merupakan sumber informasi politik yang memiliki lingkup kelengkapan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan radio, spanduk dan penyuluhan. Ini dapat dipahami sebab ketiga media tersebut dari sisi ruang dan waktu yang disediakan di dalamnya cukup luas dan fleksible. Termasuk di dalamnya pula ketiga media tersebut, yakni surat kabar, televisi dan media online merupakan sumber-sumber informasi politik yang lebih dipercayai dari media lainnya.

Media Dalam Pendidikan Politik

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa media dalam pendidikan politik sebagai *message delivery system* karena diyakini bahwa media mampu meningkatkan magnitudo dan eskalasi proses komunikasi dalam pendidikan politik tersebut. Hanya saja, penggunaan media, dalam konteks bagi pemilih pemula, mesti diselaraskan dengan pola dan karakteristik penggunaan media pemilih pemula.

Kecenderungan-kecenderungan terkini dalam pemakaian media menjadi alternatif-alternatif di dalam melihat pemakaian media untuk pendidikan politik. Karenanya, pandangan-pandangan yang muncul tentang media apa saja yang paling relevan dan tepat digunakan untuk pendidikan politik ini, muncul usulan seperti: pemanfaatan hacking untuk menyisipkan pesan-pesan pendidikan politik; pemakaian media sosial (social media); smartphone, art performance dan sebagainya.

Usulan semacam ini sejalan pula dengan pandangan mereka yang menilai bahwa penyampaian pendidikan politik yang selama ini mereka terima sering disampaikan dengan cara dan menggunakan bahasa yang berat dan sulit dipahami. Kemasan pesan politik melalui media-media tersebut jelas mencerminkan perlunya keselarasan antara mode pemakaian media bagi pemilih pemula dengan mode pendidikan politik.

Tren pemakaian media di kalangan pemilih pemula, kemasan media yang kreatif dan cara penyampaian yang mudah. Ketiga unsur ini

menjadi bagian menarik yang tampak dari apa yang mereka harapkan di dalam mengemas pendidikan politik bagi kalangan pemilih pemula. Jadi, tidak mengherankan bila dalam FGD ini muncul usulan bahwa pendidikan politik perlu disampaikan melalui bentuk art performance/ seni pertunjukkan atau drama.

Mereka melihat perlu suatu kreasi yang dicocokkan dengan penggunaan media dalam pendidikan politik melalui selera muda dalam kategori pemilih pemula. Ini tentu saja, menjadi catatan tersendiri dalam penelitian ini. Artinya pemanfaatan media baru menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dalam taraf dan kepentingan tertentu, misalnya dari jumlah pemakaian media, dampak yang ditimbulkan, serta keserempakan yang dimiliki atas media tersebut, televisi tetap dipandang sebagai media yang paling penting bagi pendidikan politik.

Atas pemahaman ini, mereka kemudian mengusulkan perlunya suatu kemasan-kemasan baru dan menarik dalam membuat program-program acara bagi pendidikan politik ini. Sebagian mengusulkan perlunya sebuah channel politiktersendiri. Sebagian yang lain mengusulkan membuat stasiun televisi khusus untuk politik (TV Politik). Sebagian mengingatkan peran dan tugas TVRI agar memaksimal program-program acaranya bagi pendidikan politik. Sebagian yang lain mengusulkan agar pemerintah bekerjasama dengan televisi lokal bagi pendidikan politik. Pendek kata, televisi merupakan media yang sangat penting bagi pendidikan politik. Bahkan iklan-iklan politik menunjukkan kekuatannya jika ditayangkan melalui media televisi.

Untuk fungsi dan kegunaan yang sifatnya komplementer, spanduk tetap dipakai misalnya dipakai untuk mensosialisasikan pesan tertentu atau sekedar menginformasikan pesan-pesan tertentu saja. Sedangkan untuk efektifitas dampak dan pengaruh, peserta FGD masih kuat menyakini bahwa bentuk komunikasi face to face communication, jauh lebih nyata dibandingkan dengan media-media yang lain. Secara tegas mereka menyatakan kekurangtarikannya terhadap media radio sebagai media yang dipakai

dalam pendidikan politik.

Simpulan

Pendidikan politik adalah sebuah proses pendidikan yang panjang dan melibatkan banyak kepentingan. Pendidikan politik dilakukan tidak hanya sekedar bagaimana masyarakat mau terlibat aktif dalam pemilihan umum tetapi mencakup aspek yang lebih luas yaitu bagaimana masyarakat mampu memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tidak bisa dilaksanakan secara instan atau tiba-tiba yang digalakkan hanya menjelang Pemilu.

Pemahaman ini ternyata juga dipahami oleh pemilih pemula. Istilah pendidikan politik memunculkan banyak gagasan. Dalam kedudukannya sebagai pemilih pemula, mereka pada umumnya tidak memandang pendidikan politik sebagai persoalan pemilihan umum. Meskipun persoalan pemilihan umum harus dan juga menjadi bagian dari pendidikan politik tersebut. Pemilihan umum merupakan bagian saja dari apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan politik.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah bagaimana mereka memiliki pemahaman tentang persoalan-persoalan politik yang ada di masyarakat. Kehidupan politik praktis yang Bahkan melihat fenomena yang terjadi selama ini, praktek-praktek politik justru menunjukkan kesan jelek dan negatif. Persoalan politik sepertinya banyak diwarnai oleh perebutan kekuasaan, tetapi jarang memperlihatkan bagaimana sulitnya merumuskan kebijakan umum yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, etika politik menjadi bagian lain dalam melihat substansi atau materi dalam pendidikan politik.

Terdapat fenomena paradoksal jika tidak dikatakan ironi, ketika mereka menyatakan mengalami semacam kebingungan terhadap sistem ketatanegaraan yang berkembang dan berlaku sekarang. Hubungan antar lembaga negara tidak terstruktur secara jelas dan gamblang. Kewenangan dan kebijakan antar

lembaga negara saling tumpang tindih dan saling mengklaim satu sama lain.

Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bernegara menjadi kata kunci sebagai temuan penelitian. Dalam pandangan mereka, hal yang harus ada di dalam materi pendidikan politik adalah pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bernegara. Untuk apa bangsa Indonesia bernegara. Apa tujuan-tujuan berdirinya NKRI serta filosofis dan landasannya. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran bernegara ini menjadi bagian yang paling substansial agar perilaku-perilaku politik selalu tetap dan konsisten pada tujuan asasi kenapa NKRI ini didirikan.

Sulitnya dan belum adanya pilihan terhadap siapa yang pantas menjadi pemimpin pada tahun 2014 menjadi cerminan rendahnya kepercayaan para pemilih pemula terhadap figur-figur yang ada sekarang sekaligus sebagai petanda kekurangtahuan mereka terhadap kriteria kepemimpinan yang baik dalam memimpin bangsa dan negara ini. Faktor kepercayaan berhubungan dengan perilaku politik dari elit politik. Jika perilaku politik berkualitas, kepercayaan akan berpihak kepadanya. Sebaliknya, jika perilaku politik hanya didasarkan pada ambisi kekuasaan, kepercayaan ini akan menjauh. Sedangkan kekurangtahuan terhadap kriteria kepemimpinan dapat disebabkan tidak tersedianya informasi yang cukup tentang kepemimpinan dan kenegarawanan. Karena itu, dalam pandangan pemilih pemula, materi tentang etika dan kepemimpinan politik harus menjadi bagian dalam pendidikan politik

Ada semacam anggapan, pembicaraan atau pembahasan mengenai politik merupakan pembahasan atau pembicaraan yang berat. Politik sebagai sesuatu yang kompleks, rumit dan berat. Terminologi kebahasaan yang digunakan merupakan terma-terma yang sulit untuk dimengerti dan dipahami. Dalam pendidikan politik yang dikemas untuk pemilih pemula, hambatan linguistik semacam ini perlu dihindarkan.

Bagaimana di dalam pendidikan politik disampaikan secara ringan dan melalui

penggunaan bahasa yang sederhana serta mudah dipahami. Dalam hal ini patut dihindari adanya asumsi bahwa pemilih pemula tersebut telah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang istilah-istilah yang ada di dalam dunia politik.

Teori-teori tentang politik dapat disampaikan dalam pendidikan politik, tetapi akan lebih bermanfaat, apabila di dalam pendidikan politik tersebut, dibahas kasus-kasus yang relevan dan aktual yang sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Sinergisitas antara teori dan praktek perlu dikemas secara proporsional, disampaikan secara dramatis, dipresentasikan secara nyata, diartikulasikan secara memadai dan tepat sasaran.

Berbagai metode penyampaian tentang bagaimana seharusnya pendidikan politik dikembangkan sebenarnya tidak dapat digeneralisir terhadap semua materi yang ingin disampaikan. Setiap metode penyampaian mempertimbangkan karakteristik materi pendidikan politik. Misalnya materi tentang pemilihan umum. Metode penyampaiannya dapat dikembangkan melalui simulasi.

Berbeda dengan materi tentang ketatanegaraan, dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi atau seminar. Demikian pula materi tentang kepemimpinan politik dapat dikembangkan melalui Diksar Politik. Usulan-usulan tentang bagaimana pendidikan politik dilakukan merupakan usulan-usulan yang menarik yang sebelumnya tidak terpikirkan sebagai metode penyampaian pendidikan.

Daftar Pustaka

- Andrain, Cahrles F, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ahdiyana, Marita, 2009, *Pemilu sebagai wahana Pendidikan Politik*, Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXX STIA-AAN, 13 Juni 2009.
- Fenyapwain, Marissa Marlein, 2013, *Pengaruh Iklan Politik dalam pemilukada*

- Minahasa terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di desa Tounelet Kecamatan Kakas, *Journal "Acta Diurna"*, Volume I. No. 1, pp. 1-16.
- KPU Provinsi DIY, 2011, *Pemilu 2009, Pemilukada 2010 dan 2011 di Provinsi DIY dalam angka*, Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagoes, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardatillah, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Munculnya Golput, (Studi Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009)*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan..
- Mawardi, Irvan, 2008, *Pilkada dan Partisipasi Politik*, artikel dalam jpr.org. akses tanggal 24 Mei 2011.
- Nasiwan, 2005, *Model Pendidikan Politik : Studi kasus PKS DPD Sleman*, Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan, November, Th. XXIV, No. 3
- Nugraha Jati, Susilastuti, Asep Saepudin, Arif Wibawa, 2009, *Model Pendidikan Politik Perempuan*, LPPM, UPN "Veteran" Yogyakarta
- Nurhadiantomo, *Model Penyelenggaraan Pemilu terpadu (Legislatif dan Eksekutif) dan Efeknya Bagi Pendidikan Politik Masyarakat*, at www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/abstrakpdf.jsp?id=134192&lokasi=local.
- Parpata, Heriawan Eka, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2009 (Studi Pada Siswa-siswi SMA Kristen 3 Bandarjaya Barat Lampung Tengah)* skripsi Universitas Bandar Lampung
- Pambudi, Himawan S, Erry Syahrian, Yanuardi. 2003. *Politik Pemberdayaan. Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama
- Rubyanti, Rika, 2009, *Pengaruh Popularitas terhadap Pilihan Pemilih pemula (Fenomena masuknya artis dalam politik)*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiajid, 2011, *Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi pemilih pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang tahun 2010*, *Integralistik*, No.1/Th. XXII/2011, Januari-Juni, pp.18-33.
- Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sukardi, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan ke delapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sumarno, AP, 2002, *Komunikasi Politik*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wulandari, Noveny, 2010, *pengaruh terpaan iklan pemilu "Contreng" di Televisi terhadap minat memilih pada pemilih pemula (Study Korelasional Pada Mahasiswa Semester 1 dan 2 di Jogjakarta)*, skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- Zuhri, Sihabudin, 2010, *Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik*, akses e print Undip. Ac, Id/23898/ akses tanggal 29 Oktptber 2013.